

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertahanan adalah bidang pengetahuan yang ada sebagai respons terhadap potensi ancaman (Supriyatno, 2014: 33). Selain itu, pertahanan juga merupakan upaya yang terus menerus dilakukan untuk mencapai keamanan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan selalu saling berinteraksi dengan potensi ancaman. Definisi ancaman itu sendiri merujuk pada faktor yang dapat menciptakan situasi mengancam kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa serta mengganggu kesejahteraannya. Di kawasan Asia Pasifik, terdapat tingkat kompleksitas strategis yang tinggi dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Terlebih lagi, dengan pergeseran geopolitik dan geostrategi dari Timur ke Asia Pasifik.

Perubahan dinamis dalam lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik saat ini memiliki dampak signifikan pada keragaman ancaman yang terjadi secara multi dimensional. Ancaman tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu ancaman militer, ancaman non militer, dan ancaman hibrida, yang semuanya dapat mencakup aspek konkret dan yang masih bersifat potensial (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015: 1). Perubahan yang semakin sulit diprediksi dalam dinamika global telah menjadi faktor utama dalam pembentukan kerja sama baik dalam skala bilateral maupun yang lebih luas (Departemen Pertahanan Indonesia, 2008: 9). Perkembangan umum dalam lingkungan strategis menunjukkan tren eskalasi dan kompleksitas yang semakin meningkat di berbagai wilayah dunia. Isu-isu global seperti perlindungan hak asasi manusia, penyebaran senjata pemusnah massal, terorisme, aktivitas spionase, kemajuan teknologi informasi, dan peran yang semakin kuat dari aktor non-negara semuanya menjadi hal yang memengaruhi kemampuan suatu negara untuk melakukan kerja sama pertahanan.

Kawasan Asia Pasifik dianggap sebagai titik pusat keamanan global dan memiliki signifikansi strategis yang tak tertandingi di seluruh dunia (Syahrin, *Jurnal Global & Strategis*, 2018: 146). Jika dilihat dari perspektif keamanan tradisional, kawasan Asia

Pasifik menghadapi tantangan dan peluang yang sangat kompleks. Tantangan tersebut termasuk konflik di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan ketegangan di Selat Malaka. Terutama, perkembangan militer China yang sejalan dengan pertumbuhan ekonominya telah memunculkan berbagai spekulasi dan ketidakpastian, serta mengkhawatirkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan rivalnya, Amerika Serikat. Hal ini dapat menciptakan *security dilemma* bagi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, situasi ini memberikan insentif bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk mengambil tindakan yang rasional dengan tujuan mengembangkan sistem keamanan mereka masing-masing.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki tujuan tersendiri dalam hal ekonomi, politik, dan kepentingan nasional, namun untuk menjaga stabilnya kawasan, peningkatan pertahanan wajib dibentuk bersama karena menyangkut kelancaran masing-masing kepentingan yang hendak dicapai serta keuntungan yang didapat. Selain itu, guna membentuk lancarnya komunikasi antar negara, kelancaran ekonomi, dan dapat mendekatkan hubungan secara bilateral maupun multilateral (Saragih, 2018, p. 50). Dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya, suatu negara selalu memiliki tujuan untuk melindungi kelangsungan hidup dan kebutuhan setiap warga negaranya. Dalam usaha untuk melindungi eksistensinya, pemerintah suatu negara memiliki strategi dan kewenangan untuk mengendalikan serta menetapkan kebijakan di wilayah negaranya masing-masing termasuk kebijakan dalam menghidupkan industri pertahanan (Alunaza & Toy, 2019).

Komite Kebijakan Industri Pertahanan telah mengkoordinasikan kebutuhan perlengkapan pertahanan dalam rangka pemenuhan *Minimum Essential Force* dengan kemampuan industri pertahanan nasional yang diatur dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Industri Strategis Pertahanan dan diimplementasikan dalam pengadaan peralatan militer. Untuk pengadaan ini, kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian pertahanan bilateral atau multilateral diperlukan. Kegiatan penting lain selain pengadaan adalah pendayagunaan melalui penyusunan *blue print, grand design* beserta *road map* didukung dengan penelitian dan pengembangan.

Indonesia sebagai negara besar memiliki kebijakan untuk melakukan kerjasama dalam sektor pertahanan sebagai wujud preventif dalam upaya melindungi kepentingan

nasionalnya dari ancaman regional maupun global. mengingat posisi strategis Indonesia yang bertengger di antara dua samudra, menjadikan negara ini sebagai penghubung penting dalam perdagangan dan navigasi antar negara, serta kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi dalam menjaga keamanan nasional. Upaya tersebut tentu harus dilakukan demi terwujudnya citra positif Indonesia, salah satunya melalui diplomasi pertahanan. Dalam penelitian ini, kerja sama pertahanan dilakukan dengan China, sebuah negara besar yang tengah mengalami pertumbuhan signifikan di tingkat regional dan global, baik dalam sektor ekonomi maupun militer.

China dengan kekuatan ekonominya memiliki kemampuan untuk mendukung proses peningkatan dan modernisasi kapabilitas militer. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar kegiatan ekonominya tetap berjalan lancar. Di sisi lain, China memiliki sumber daya alam di wilayah perairan di sekitar China yang rentan terhadap berbagai potensi ancaman, khususnya dalam jalur laut yang sangat penting. Hal ini menjadi sumber kekhawatiran bagi China karena kerentanannya dapat mengganggu aktivitas ekonominya. Sebagai contoh, sekitar 80% impor minyak China melalui Selat Malaka (Hendrajit, 2013), yang merupakan selat strategis yang menjadi pusat persaingan. Situasi ini mendorong China untuk mengembangkan kekuatan militer secara progresif guna melindungi jalur maritim krusial dan memfasilitasi pergerakan di laut lepas.

Kerja sama pertahanan Indonesia dan China dimulai pada 2005, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China menandatangani Kemitraan Strategis. Kerjasama ini didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia mencari dukungan pertahanan dan keamanan dari China untuk memperkuat posisinya, sementara China melihat potensi Indonesia sebagai pasokan energi dan pasar yang menguntungkan. Indonesia menjadi bagian dari kebijakan luar negeri China dan merupakan prioritas dalam upaya meningkatkan keamanan dan stabilitas China di kawasan Asean dan Asia Pasifik.

Kerja sama tersebut kemudian diperluas dengan adanya pertemuan Kerja sama Industri Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan *State Administration for Science, Technology, and Industry for National Defence* (SASTIND).

Kerjasama ini diatur dalam *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani pada 22 Maret 2011. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek kerjasama, termasuk dalam pengadaan peralatan militer, transfer teknologi untuk beberapa peralatan militer yang telah disepakati, kerjasama dalam produksi, pengembangan bersama, dan pemasaran bersama untuk sejumlah alat militer tertentu (MoM DICM, 2012).

Defence Industry Cooperation Meeting (DICM) merupakan pertemuan tahunan dari komite kerjasama industri pertahanan yang pertama kali digelar pada tahun 2012 (Parameswaran, 2018). Pertemuan ini adalah bagian dari Diplomasi Pertahanan atau *First Track Diplomacy* karena dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara yang terlibat. Secara prinsip, pelaksanaan DICM harus mengikuti peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang Pemerintah nomor 16 tahun 2012. Pengembangan industri pertahanan ini memiliki serangkaian langkah untuk menguasai teknologi yang mendukung pembangunan sistem pertahanan negara yang kuat, modern, dan adaptif. (Kementerian Pertahanan RI, 2015: 63).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis kemukakan, terdapat pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini yakni : “Mengapa *Defence Industry Cooperation Meeting* dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan China?”

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah alur logika berpikir yang menghubungkan antara teori atau konsep dengan berbagai variabel penelitian yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pada bagian ini akan di kemukakan konsep yang menjadi acuan pada penelitian yang dilakukan.

A. Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan pertama kali diperkenalkan oleh Inggris pada tahun 1998 melalui *Strategic Defense Review*. Ini bertujuan untuk menggabungkan alat-alat militer dan diplomatis untuk mencegah konflik dan mengelola situasi krisis (Thucydide, afri-ct.org). Diplomasi pertahanan adalah contoh dari diplomasi jalur pertama karena melibatkan pemerintah dan melibatkan kerja sama baik di tingkat multilateral maupun bilateral, yang mencakup aspek-aspek seperti keamanan nasional dan aktivitas militer.

Diplomasi Pertahanan adalah bagian dari disiplin Ilmu Sosial Politik yang termasuk dalam ranah studi Hubungan Internasional (Simamora, 2013: 7) karena melibatkan negara sebagai aktor utama. Tujuan utama pelaksanaan diplomasi pertahanan adalah mencegah eskalasi konflik hingga mencapai tingkat konflik terbuka, yaitu perang, karena perang seringkali dianggap sebagai opsi terakhir jika upaya diplomasi mengalami kebuntuan. Keberhasilan diplomasi pertahanan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, hak asasi manusia, serta aspek pertahanan dan keamanan di dalam negeri.

Konsep diplomasi pertahanan telah berkembang menjadi tiga varian yang berbeda.

Pertama, diplomasi pertahanan digunakan oleh suatu negara sebagai alat untuk mengejar kepentingan nasionalnya, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Kedua, dalam pendekatan tradisional diplomasi pertahanan dianggap sebagai sarana kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara untuk mencari mitra atau aliansi. Ketiga, dalam perkembangannya yang lebih modern, diplomasi pertahanan pasca tradisional bertujuan untuk membangun hubungan positif dengan negara lain dengan tujuan mengurangi tingkat ketidakpastian di lingkungan internasional (Syawfi, Tesis UI, 2019: 18).

Konsep Diplomasi Pertahanan merupakan dasar penting dalam penelitian ini. Konsep ini menjadi akar dari kerja sama dalam industri pertahanan, karena Diplomasi Pertahanan menyangkut aktivitas kerja sama yang melibatkan militer dan segala aspek yang terkait, termasuk operasi militer di luar konteks perang. Oleh karena itu, konsep ini sangat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang berfokus pada kerja sama dalam industri pertahanan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka bilateral yakni kerja sama internasional antara Indonesia dan China. Dapat dilihat melalui penjelasan pembagian kerja sama, penulis melihat bagaimana kepentingan Indonesia dan China dalam kerja sama industri pertahanan serta bagaimana kerja sama bilateral tersebut berimplikasi pada industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Di masa yang akan datang, diplomasi pertahanan akan semakin penting untuk diperkuat (Departemen Pertahanan RI, 2008: 140).

B. Kerja Sama Pertahanan

Awal terbentuknya kerja sama pertahanan antar negara, dapat ditinjau dari hasil analisa tentang perkiraan ancaman (*Treat Assesment*). Setiap negara akan mengantisipasi akan adanya potensi tentang munculnya suatu ancaman yang vital bagi negaranya. Dalam upaya menghadapi ancaman tersebut, suatu negara secara hati-hati menilai apakah mampu menghadapinya sendiri, sehingga mereka mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Ketergantungan terhadap bidang teknologi telah menjadi suatu kebutuhan pada masa kini dan masa mendatang. Hampir tidak ada teknologi persenjataan modern saat ini yang sepenuhnya berasal dari negara tertentu. Kesadaran adanya interpededensi atau saling ketergantungan tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk menjalin kerja sama dengan negara lain (Simamora, 2013 : 50).

Kerja sama pertahanan adalah bentuk kerja sama formal antara dua negara atau lebih yang melibatkan penggunaan perjanjian, kesepakatan, atau bentuk lainnya, baik yang memiliki

kewajiban hukum (*binding*) maupun yang tidak (*non-binding*). Salah satunya adalah melalui pembentukan *Defence Industry Cooperation Meeting*. Kerja sama pertahanan menekankan kepada kepentingan nasional suatu negara, karena kerja sama ini sangat sensitif dan akan menyangkut kedaulatan negara, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Ruang lingkup kerja sama pertahanan akan menjadi sangat penting apabila dalam substansinya menyangkut ruang wilayah atau teritori yang bersinggungan dengan kedaulatan wilayah suatu negara yang didalamnya termasuk kehidupan masyarakatnya. Ruang lingkup kerja sama pertahanan biasanya berisi tentang kerja sama (Supriyatno, 2014 : 152) :

- a. Teknis melalui pertukaran data teknis dan ilmiah;
- b. Pertukaran para ahli, teknis dan peserta dosen militer;
- c. Dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
- d. Industri pertahanan;
- e. Alih teknologi;
- f. Bantuan teknis;
- g. Pendidikan dan latihan;
- h. Pertukaran informasi intelejen;
- i. Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan

Kerja sama pertahanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat vital apabila memiliki arti ganda dan tidak memiliki arah, hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Dalam upaya membangun kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain, terdapat tiga aspek yang menjadi target dan tahapan yang harus dikembangkan. Pertama, membangun saling kepercayaan antara negara-negara tersebut. Kedua, mencegah terjadinya konflik antara mereka. Dan ketiga, bekerja sama mencari solusi terbaik jika terjadi perselisihan, sehingga konflik dapat dihindari.

C. Industri Pertahanan

Peran industri pertahanan di era globalisasi dianggap sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Hampir semua negara di dunia saat ini menunjukkan keberadaannya di ranah industri pertahanan dengan tujuan mengembangkan industri pertahanannya sendiri sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Di dalam kerangka kerjasama internasional saat ini, telah terjadi berbagai bentuk kerja sama dalam sektor industri pertahanan, baik dalam

hal kerja sama pembelian peralatan militer maupun kerja sama untuk modernisasi peralatan militer (alutsista).

Setiap negara memiliki alasan tertentu dalam hal peningkatan kapabilitas pertahanannya. Perkembangan teknologi di sektor non-militer yang mempengaruhi sektor militer menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertimbangan dalam menjaga kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar wilayah negara. Hal ini menjadi alasan utama mengapa suatu negara meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Meskipun tidak ada insentif atau keuntungan langsung bagi suatu negara untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya, modernisasi tetap berlangsung. Ini disebabkan oleh sistem internasional yang bersifat anarkis dan tidak dapat diprediksi. Terdapat kekhawatiran bahwa negara lain dapat memperoleh keunggulan dalam teknologi militer yang dapat mengancam keamanan negara itu sendiri (Goldstein, 2010: 77).

Dalam industri pertahanan fungsi utama negara yaitu sebagai instrumen dalam membangun industri pertahanan di dalam negeri. Dalam hal ini khususnya paada negara-negara berkembang dan industri yang baru. contohnya produksi persenjataan akan didominasi oleh negara secara utuh maupun sebaagian juga termasuk dalam kepemilikan oleh negara. Penilaian kemampuan sebuah industri pertahanan tercermin dari tingkat kesiapan dalam hal manufaktur dan teknologi. Aspek ini menggambarkan kemampuan industri pertahanan dalam mengadaptasi perubahan dan inovasi produk serta kemampuan dalam melaksanakan uji coba dan tes pada komponen, subsistem, prototipe, dan sistem secara keseluruhan untuk menilai fungsi esensial dari produk tersebut. Tingkat kesiapan ini menjadi penentu bagi sejauh mana suatu industri dapat menjalin kerja sama. Peningkatan tingkat kesiapan dalam hal manufaktur dan teknologi dapat dicapai melalui beberapa metode, antara lain pembelian lisensi, produksi bersama, modernisasi peralatan produksi, bagian produksi bersama, pengembangan bersama, serta penambahan fasilitas penelitian seperti laboratorium dan pusat perancangan (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015 : 65).

1.4 Hipotesis

Defence Industry Cooperation Meeting antara Indonesia dan China dianggap penting bagi Indonesia karena kerja sama ini akan berfokus pada alih teknologi. Melalui alih teknologi tersebut, diharapkan mampu mengembangkan peralatan pertahanan dan keamanan guna meningkatkan prestise Indonesia di mata dunia dan memberikan wawasan tambahan kepada

teknisi Indonesia yang terlibat. Kerjasama Industri Pertahanan tersebut juga dapat mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia – China.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial atau perilaku manusia dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, non-angka, dan mendalam. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman konteks, interpretasi, dan makna dibandingkan dengan pengukuran kuantitatif. Metode kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan berbagai bidang lainnya untuk menjelajahi aspek-aspek yang kompleks dan multifaset dari realitas manusia. Ini melibatkan teknik seperti observasi, analisis teks, dan analisis konten. Tujuan dari penggunaan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena kerja internasional melalui DICM dengan sedalam-dalamnya.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif eksplanatif dengan tujuan untuk mencari pemahaman tentang alasan di balik terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Fokus utama penelitian ini adalah kerjasama dalam Industri Pertahanan antara Indonesia dan China. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan produk-produk pertahanan yang telah berhasil dikembangkan, dampak yang dihasilkan terhadap industri pertahanan Indonesia baik yang positif maupun negatif, serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama kerjasama pertahanan Indonesia dengan China melalui *Defence industry Cooperation Meeting* .

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: penelitian lapangan dan studi pustaka. Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi atau sumber yang menjadi fokus penelitian. Dalam metode ini, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kontekstual dari sumber asli, yang sangat berharga dalam

menjalankan penelitian yang melibatkan interaksi langsung dengan situasi atau obyek yang diteliti.

Melakukan observasi langsung untuk pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena, peristiwa, objek, atau individu tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Dalam observasi langsung, penulis mengamati apa yang terjadi secara objektif. Tujuan digunakannya teknik ini adalah untuk mengamati dinamika kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan China, memahami perilaku kedua aktor, serta untuk mengevaluasi hasilnya terhadap industri pertahanan Indonesia.

Sedangkan studi pustaka atau tinjauan pustaka adalah proses penelitian yang melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis literatur terkait topik penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Studi pustaka membantu penulis untuk membangun dasar teoritis, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, dan merencanakan metodologi yang sesuai. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menunjukkan bahwa penelitiannya akan memberikan kontribusi berharga terhadap pengetahuan.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah rangkaian tindakan untuk menghasilkan data akhir dengan cara mengelompokkan informasi dan menyusunnya dalam suatu pola berpikir. Proses analisis data dimulai dengan meninjau semua data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi langsung yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, serta dokumen resmi, dan lain sebagainya. Setelah data yang terkumpul diperiksa, dipelajari, dan dipahami, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data dengan merangkum inti informasi tersebut melalui teknik seperti pemetaan gagasan (*brainstorming*). Setelah itu, penulis akan mengembangkan rangkuman inti tersebut dengan melengkapi dengan opini yang didukung oleh data yang telah dikumpulkan.

Tujuan dari analisis data adalah menjelaskan data agar lebih mudah dimengerti dan juga untuk mencapai kesimpulan atau membuat inferensi mengenai karakteristik populasi berdasarkan informasi yang diambil dari sampel, yang sering kali melibatkan proses pendugaan dan pengujian hipotesis.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang telah didukung dengan rumusan masalah diatas adalah untuk menganalisis peran dan dampak *Defence Industry Cooperation Meeting* dalam pengembangan kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan China.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam empat bab yang saling berhubungan guna mencapai hasil penelitian yang teratur dan sistematis. Pembagian sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

BAB I. Berisi ulasan pemahaman yang menjelaskan mengenai subjek - subjek penelitian. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Berisi penjelasan lebih lanjut dari bab sebelumnya. Menjelaskan dinamika hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan China. Membahas *Defence industry Cooperation Meeting* itu sendiri sebagai wadah kerjasama yang menjadi fokus penelitian. Dan menjelaskan kondisi industri pertahanan masing – masing negara untuk menjadi acuan pemaparan mengapa kedua negara dapat berkerja sama.

BAB III. Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hasil dari kerjasama industri pertahanan Indonesia dan China melalui *Defence industry Cooperation Meeting*. Dengan menjelaskan alutsista hasil pengadaan dan pengelolaan serta pelaksanaan program *Defence Complex of Indonesia*. Memaparkan tentang hambatan dalam pelaksanaan *Defence Industry Cooperation Meeting* dan implikasi dari adanya DICM terhadap kekuatan militer dan industri pertahanan Indonesia.

BAB IV. Merupakan bagian penutup dan kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan sebelumnya dimana berisi tentang ringkasan mengenai penelitian dalam keseluruhan bab.